



**Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Adat Negeri Hutumuri
Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon**

*Social Capital in the Management of Hutumuri State Customary Forests,
South Leitimur District, Ambon City*

Hilery G. Silooy¹, Marthina Tjoa^{2,*}, Iskar²

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon 97233, Indonesia

²Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon 97233, Indonesia

*Penulis korespondensi e-mail: tjoatine@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:
Social capital;
Customary forest;
Management.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the forms of social capital and the role of indigenous peoples in customary forest management. To analyze the elements of social capital in customary forest management in Hutumuri Country. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative and quantitative approach. The results of the study show that the Hutumuri community believes in existing rules (written and unwritten rules) that the Hutumuri community builds and maintains social relations in one country on the basis of kinship and neighborly social relations that also take place between members of the Hutumuri community and members of neighboring communities Social capital! in the Hutumuri community, it is measured by its elements, Belief in the network. Social norms of solidarity are quite strong, the level of trust among members of the Hutumuri community is high. They trust each other among their members

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Modal sosial;
Hutan adat;
Manajemen

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bentuk Modal Sosial dan peran masyarakat adat dalam pengelolaan Hutan adat Menganalisa unsur-unsur modal sosial dalam pengelolaan hutan adat di Negeri Hutumuri. Metode yang di lakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan Masyarakat Hutumuri percaya pada aturan-aturan yang ada (aturan tertulis maupun tidak tertulis) masyarakat Hutumuri membangun dan memelihara hubungan sosial dalam satu negeri dengan basis ikatan kekeluargaan dan ketetanggan. Hubungan sosial juga berlangsung antara warga masyarakat Hutumuri dengan warga masyarakat tetangga. Modal sosial pada masyarakat Hutumuri di ukur dengan unsu-unsur nya Kepercayaan, jaringan sosial, norma sosial, solidaritas tergolong cukup kuat tingkat kepercayaan sesama warga masyarakat hutumuri tergolong tinggi. Mereka saling percaya antara sesama anggota.

PENDAHULUAN

Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial memberi kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat. Modal sosial dalam bentuk kewajiban sosial yang diinstitusionalisasikan ke dalam kehidupan bersama, peran, wewenang, tanggung-jawab, sistem penghargaan dan keterikatan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif. Modal sosial sebagai hubungan yang tercipta dari norma sosial yang menjadi perekat sosial, yaitu terciptanya sebuah kesatuan dalam anggota kelompok secara bersama-sama. Modal sosial timbul dari interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Pengukuran modal sosial dapat dilihat dari interaksi baik individual maupun institusional, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat.

Negeri Hutumuri adalah sebuah negeri adat yang terdapat di semenanjung Timur Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. Keberadaan Negeri Hutumuri sebagai masyarakat adat memiliki pranata adat yang mengatur kehidupan masyarakat maupun mengatur hubungan masyarakat dengan hutan. Masyarakat Negeri Hutumuri, dalam kehidupan sosialnya telah mengembangkan nilai-nilai luhur yang diwariskan untuk menjaga hubungan kekerabatan satu dengan lainnya. Masyarakat berpegang pada aturan tersebut karena dirasakan adanya kesesuaian dengan karakteristik masyarakat. Simbol-simbol dan norma-norma serta aturan adat dengan berbagai sanksi telah dipahami oleh masyarakat sehingga konflik yang berkepanjangan tidak bisa terjadi.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan bagaimana perhutanan social dengan skema Hutan Adat (HA) berbasis modal social dapat dikelola dengan harapan ada keberlanjutan dan kelestarian hutan tersebut. Selain itu kajian modal social masih terbatas dalam pengelolaan hutan adat di wilayah Maluku, terutama aspek peranan, bentuk dan jenis modal social. Untuk itu penelitian dengan judul "Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan adat di Negeri Hutumuri" sangat penting dilakukan.

METODE PENELITIAN

Bahan

Bahan penelitian yang digunakan adalah menggunakan kuisisioner, alat tulis dan seperangkat komputer untuk mengolah hasil penelitian. Dengan tujuan agar proses penelitian berlangsung penulis dapat mengambil data maupun mencari informasi secara detail dan terperinci

Prosedur

Prosedur penelitian dengan menyiapkan data dari hasil jawaban pertanyaan kuisisioner yang di ajukan sehingga menjawab tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat dan pengelolaan hutan adat Negeri Hutumuri

Analisis Data

Tingkat Modal sosial dianalisis dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan skala Likert yaitu metode yang menjabarkan beberapa item pernyataan yang disusun dalam kuisisioner dan setiap pernyataan diberi skor senilai dengan pilihan responden. Pengukuran skala *likert* menggunakan tiga indikator yaitu tinggi, sedang, rendah Ketiga indikator tersebut dijabarkan dalam kuisisioner dengan metode skoring (skala *likert*) Tinggi = 3, Sedang = 2, Rendah = 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur modal sosial dalam pengelolaan hutan adat di Negeri Hutumuri

Kepercayaan (*Trust*) Terhadap Anggota Masyarakat Yang Lain

Tingkat kepercayaan masyarakat desa Hutumuri dinilai dalam beberapa pertanyaan kunci terkait pengelola Hutan umumnya memiliki tingkat kepercayaan yang lebih, namun pada beberapa unsur dari tingkat kepercayaan ditemukan adanya ketidakpercayaan terhadap Pemerintah negeri, bahkan sesama etnis maupun yang berbeda etnis serta adanya keragu-raguan (sedang) terhadap individu lain. Hal ini terjadi karena adanya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dalam mengelola hutan adat. Namun dalam hal pengelolaan hutan adat masyarakat lebih berada dalam tingkat presentasi kategori tinggi. Begitu pula dengan kesediaan warga dalam menguatkan hubungan sosial antar sesama anggota masyarakat.

Tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap tokoh masyarakat tergolong tinggi. Hal ini didukung oleh norma-norma (*norms*), nilai-nilai (*values*), sikap (*attitudes*), dan keyakinan (*beliefs*) yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama Kristen Protestan yang dianut oleh masyarakat setempat. Norma-norma yang berlaku juga merupakan norma yang sudah diakui, dipatuhi dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam proses berinteraksi dalam kehidupan dengan sesama maupun dengan alam disekitar yang telah berlangsung secara turun-temurun. Selain itu juga ada hubungan antar keluarga (marga) yang lebih meyakinkan dalam hubungan kepercayaan terhadap sesama dengan hal tersebut masyarakat juga turut memperkuat relasi untuk terus membangun dan mengelola hutan adat secara bersama-sama untuk kehidupan kedepannya.

Tabel 1. Distribusi responden menurut tingkat norma sosial

Unsur modal sosial	Tingkat Kepercayaan (%)		
	Kepercayaan	Rendah	Sedang
- Kepercayaan terhadap sesama di sekitar	0	37	63
- Tokoh masyarakat	0	23	77
- Pemerintah negeri	6	27	67
- Orang-orang dengan etnis yang sama	3	27	70
- Orang-orang dengan etnis yang berbeda	6	30	64
- Tokoh agama	0	10	90
- Pihak luar (LSM)/Swasta	0	40	60
- Pemda kota	0	40	60
Rata-rata	1	34	65

Sumber: Data primer diolah tahun 2023

Jaringan sosial (hubungan yang saling berkaitan antara individu dan kelompok)

Hubungan sosial antar individu maupun kelompok sangatlah erat dalam pengelolaan Hutan Adat Negeri Hutumuri. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan dalam organisasi KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang dikelola oleh tokoh masyarakat adat. Organisasi yang dibentuk terdiri dari 30 orang anggota yang beragam, anggota yang memiliki karakter berbeda-beda, namun adanya penyatuan antar masyarakat sehingga timbul jaringan melalui kebersamaan antar anggota organisasi yang membangun.

Hubungan sosial masyarakat yang begitu erat dari masyarakat Hutumuri mampu membangun jaringan sosial melalui organisasi-organisasi yang dikelola dalam masyarakat. Kebersamaan dalam organisasi sangatlah tinggi sehingga kemampuan membangun jaringan sosial antara individu dan kelompok sangatlah erat. Namun masyarakat Hutumuri masih kurang dalam kerjasama antar kelompok diluar komunitas atau diluar masyarakat Hutumuri itu sendiri.

Tabel 2. Distribusi responden menurut tingkat jaringan sosial

Aspek	Tingkat Jaringan Sosial (%)		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Anggota RT yang terlibat organisasi yang diikuti	0	20	80
Keragaman anggota organisasi	10	20	70
Kerelaan membangun jaringan	10	30	70
Partisipasi kerjasama kelompok dalam komunitas	0	20	80
Kerjasama kelompok di luar komunitas	6	27	67
Kebersamaan dalam organisasi	0	17	83
Rata-rata	4	21	75

Sumber: Data primer diolah tahun 2023

Norma sosial (*control social* yang menentukan pola tingkah laku)

Masyarakat Hutumuri masih cukup erat dengan norma-norma yang berlaku dari zaman dahulu sampai sekarang. Selain norma-norma yang berlaku masyarakat lebih

mengutamakan aturan agama dalam proses pengelolaan hutan dapat dilihat dari tabel hasil kusioner masyarakat Negeri Hutumuri.

Di antara banyanya norma yang berlaku masih ada saja yang masih meragukan dalam hal kejujuran. Norma-norma yang berlaku juga cukup mengikat dalam menentukan pola tingkah laku masyarakat sekarang. Namun dibalik itu, norma-norma yang berlaku tetap di jadikan pedoman selama ini dalam hal bertingkah laku antar sesama masyarakat dan dalam proses pembangunan hutan adat negeri Hutumuri.

Tabel 3. Distribusi responden menurut tingkat norma sosial

Aspek	Tingkat Norma Sosial (%)		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Aturan tertulis yang mengikat individu (aturan pemerintah)	3	20	77
Aturan tidak tertulis yang mengikat individu (aturan pemerintah)	6	27	67
Aturan agama	0	10	90
Kejujuran	0	40	60
Ketaatan terhadap norma kesopanan	0	30	70
Ketaatan terhadap norma adat	0	17	83
Rata-rata	1	24	75

Sumber: Data primer diolah tahun 2023

Tindakan yang proaktif (peran aktif sebagai subjek pembangunan)

Masyarakat terus berkembang dukungan dari pihak-pihak lain dalam proses pengembangan sangatlah penting dalam masyarakat Negeri Hutumuri. Proses pembangunan melalui tindakan yang proaktif melalui masyarakat yang ingin melakukan hal terpuji tergolong tinggi dari di bandingkan keinginan saling mengunjungi untuk mendapatkan informasi.

Tabel 4. Distribusi persponden menurut tingkat tindakan yang proaktif

Aspek	Tingkat Tindakan Proaktif (%)		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Keinginan membagi pengalaman dan berbagi pengetahuan dengan sesame	3	24	73
Keinginan berbagi informasi	3	20	77
Keaktifan dalam menyelesaikan konflik	3	13	84
Partisipasi dalam pembangunan pengambilan keputusan pada kelembagaan	3	13	84
Kerelaan melakukan hal terpuji	0	10	90
Keinginan saling mengunjungi untuk mendapatkan informasi	6	20	74
Rata-rata	3	17	80

Sumber: Data primer diolah tahun 2023

Hal yang sangat baik bahwa dari organisasi yang ada masyarakat mampu bekerjasama dalam menyelesaikan konflik dan partisipasi dalam hal pengambilan keputusan dalam kelembagaan. Masyarakat memiliki harap yang tinggi sehingga masyarakat terus

berkembang dengan aktif dalam proses pengembangan pembangunan dalam hutan adat masyarakat Hutan Adat.

Kepedulian terhadap sesama dan lingkungan (sikap yang menunjukkan perhatian, solidaritas, dan empati)

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap sesama dan lingkungan sangatlah tinggi. Dalam hal kepedulian sangatlah luar biasa, dan juga memberikan motivasi-motivasi sekaligus menjaga dan saling membantu dalam hal kesusahan maupun dalam hal pembangunan masyarakat. Selain adanya kepedulian, ada juga motivasi-motivasi tertentu yang terus berkembang untuk memperhatikan dan membantu orang lain bahkan juga dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk kedepannya dalam hal pembangunan hutan adat masyarakat Negeri Hutumuri.

Tabel 5. Distribusi responden menurut tingkat solidaritas

Aspek	Tingkat solidaritas (%)		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Tingkat kepedulian terhadap sesama	0	3	97
Tingkat kepedulian terhadap lingkungan	0	3	97
Motivasi untuk memperhatikan dan membantu orang lain	0	3	97
Motivasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan	0	6	94
Rata-rata	0	4	96

Sumber: Data primer diolah tahun 2023

Tingkat unsur-unsur Modal Sosial

Unsur-unsur modal sosial struktural pada Tabel 6 menunjukkan total nilai modal social yang tinggi. Modal sosial memiliki keeratan hubungan sangat tinggi, saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Modal sosial mempengaruhi perilaku sampai dengan mekanisme terbentuknya harapan dan/atau ekspektasi masyarakat yang pada akhirnya modal sosial lebih menentukan nilai-nilai bersama, norma dan harapan sebagai bagian dari perwujudan sikap dan pola perilaku masyarakat yang kemudian menentukan kepatuhan aturan, mengambil peranan dan memperluas interkasi sosial dan atau jaringan dalam modal sosial struktural.

Tabel 6. Tingkat unsur-unsur modal sosial

No	Unsur-unsur modal sosial	Kategori		
		R	S	T
1	Kepercayaan	1	34	65
2	Jaringan sosial	4	21	75
3	Norma sosial	1	24	75
4	Tindakan yang aktif	3	17	80
5	Solidaritas	0	4	96

Sumber: Data primer diolah tahun 2023

Modal sosial dalam pengelolaan hutan adat di negeri hutumuri telah mendukung terwujudnya performansi hutan adat yang tinggi. Hal ini dicirikan dengan nilai produktivitas yang tinggi, penggunaan sumberdaya yang efisien, keberlanjutan dan keadilan dalam pemanfaatan hasil hutan secara lestari dan optimal.

KESIMPULAN

Modal sosial masyarakat hutan adat negeri hutumuri memiliki tingkat kepercayaan terhadap anggota masyarakat hutumuri memiliki tingkat kepercayaan terhadap anggota masyarakat lain yang tinggi dengan perolehan persentase senilai 65%. hubungan sosial antara masyarakat hutan adat sangatlah erat hal tersebut disebabkan karena adanya organisasi KUPS. norma sosial yang berlaku dari zaman dahulu hingga sekarang masih cukup erat, salah satunya mengutamakan aturan agama dalam proses pengelolaan hutan adat. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap sesama dan lingkungan sangatlah tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep, Y. F. (2018). Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- CIFOR. (2002). Hutan Adat. Bogor, Indonesia: Warta Kebijakan.
- CIFOR. (2012). Warta Kebijakan. Bogor, Indonesia.
- Ekawati, S., & Nurrochmat, D. R. (2014). Hubungan modal sosial dengan pemanfaatan dan kelestarian hutan lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(1), 40 - 53.
- Hanifan, L.J. (1916). The rural school community center. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 67(1), 130-138
- Hakim, I. (2010). Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor, Indonesia.
- Harahap, Mailina, & Surna. H. (2018). Produktivitas petani sayur (Studi kasus pada kelompok tani Barokah Kelurahan Tanah Enam Ratus). *Jurnal Agrium*, 21(2), 157-165.
- Hasbullah, J. (2006). Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia). Jakarta, Indonesia: MR-United Pres.
- Nurami, M. (2012). Peran modal sosial pada pemberdayaan ekonomi masyarakat studi pada usaha daur ulang di kota Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(2).
- Sagita, M. N., Akhbar, A., & Muis, H. (2019). Partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*, 7(2), 1-10.
- Sanjaya, R. (2016). Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada gabungan kelompok tani rukun lestari sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari*, 5(2), 30-42.

- Suharjito, D. & Darusman, D. (1998). *Masyarakat; Beragam Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan*. Diterbitkan Atas Kerjasama IPB dan The Ford Foundation, Bogor.
- The British Council. (2001). *Teknik Mewujudkan Partisipasi Masyarakat* London. British Council.
- Tjoa, M. (2017). *Sistem Penguasaan Lahan Hutan Pada Masyarakat Adat Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku*. Disertasi. IPB, Bogor.
- Winata, N. G. A. W., Basuki, P., & Karismawan, P. (2015). Analisis determinan pendapatan petani program hutan kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 1(1), 33-42.
- Zeilika, E. (2020). *Partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan studi kasus Gapoktan Mandiri Lestari di kesatuan pengelolaan hutan Batutegei*.